

**PERAN NEGARA DALAM
DISTRIBUSI KEKAYAAN
(STUDI PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT DALAM
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
YUKI MUNTASYIR
01380368**

PEMBIMBING :

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M. Ag.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S. Ag. M. SI.**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

DR. Hamim Ilyas, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Yuki Muntasyir

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum WR. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Yuki Muntasyir
NIM : 01380368
Judul Skripsi : **“Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan/Pendapatan (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah)”**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 November 2008

Pembimbing I



DR. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP. 150235955

Siti Djazimah S. Ag., M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Yuki Muntasyir

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum WR. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Yuki Muntasyir
NIM : 01380368
Judul Skripsi : “ **Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan/Pendapatan (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah)**”

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 November 2008

Pembimbing II



Siti Djazimah, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150282521



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02 / K.MU. SKR / P.P 009 / 025 / 2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PERAN NEGARA DALAM DISTRIBUSI KEKAYAAN
(STUDI PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH)

Yang disiapkan dan disusun oleh :

Nama : Yuki Muntasyir

N I M : 01380368

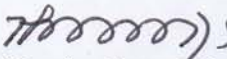
Telah dimunaqasahkan pada : jum'at 30 Januari 2009

Nilai Munaqasah : B

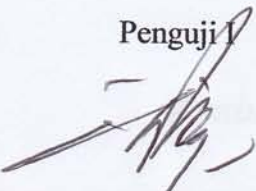
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASAH :

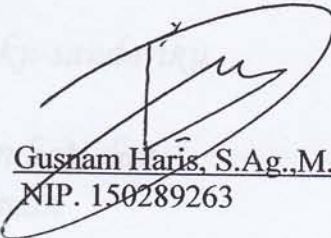
Ketua Sidang


Dr Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150235955

Penguji I

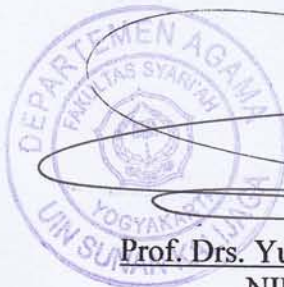

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
NIP. 150282520

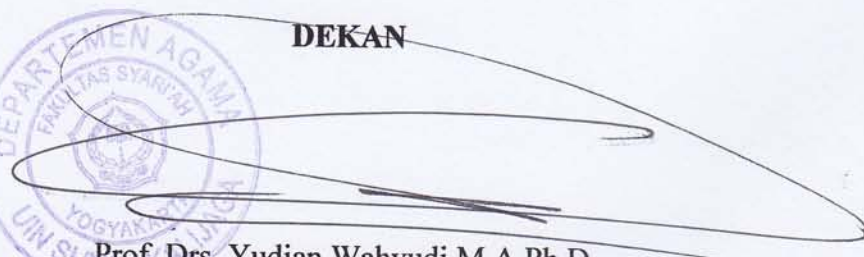
Penguji II


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 150289263

Yogyakarta, Kamis 30 April 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah

DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi M.A Ph.D.
NIP. 150240524

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan kepada
Almamaterku yang tercinta
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

*Simpuh bakti dan darmaku atas putih
cinta ayahanda dan ibunda*

Bening sayangku teruntuk saudaraku-saudariku

*Tulus kasihku teruntuk tambatan hati dan
teman-temanku yang budiman*

MOTTO

Demi masa.

*Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-nasehat supaya
mentaati kebenaran dan nasehat-nasehat supaya menetapi kesabaran.*

[Al-'Asr (103): 1-3]

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah.

Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahu.

[Al-'Alaq (96): 1-5]

ILMU

Barang siapa mempelajarinya karena Allah, itulah taqwa

Menuntutnya, itulah ibadah

Mengulang-ulang, itulah tasbih

Membahasnya, itulah jihad

Mengajarkan kepada orang yang tidak tahu, itulah sedekah

Memberikannya kepada ahlinya, itulah mendekatkan diri kepada Allah

[Abu Syaikh Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Barr, Ilya Al-Ghazali, 1986]

*Orang sukses bukanlah karena kekayaan dan jabatannya
tetapi bermanfaatnya seluruh potensi yang ia miliki secara optimal*

[Unknown]

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل سكينه في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على اله و صحبه اجمعين. اما بعد:

Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah)" ini tidak lepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi M.A. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun.
3. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI, selaku pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan motivasi dan pimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membagi ilmunya serta melayani penyusun dalam menyelesaikan studi.

5. Ayahanda Warsono dan Ibunda Fatonah sekeluarga yang selalu memberikan dukungan baik berupa materi maupun do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Alfian Hidayat SE, Dedi Istiadi dan Misbah serta semua staff dan karyawan CANDI MAS GROUP yang telah memberikan dukungan dan do'a.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada teman-teman yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, khususnya teman-teman MU-3 2000/1 dan teman-teman wisma KAMPAK, bersama kalian telah kulalui berbagai kenangan dalam gelap dan terangnya suasana Yogyakarta.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt dan mendapat limpahan rahmat dan ridha-Nya, amin.

Namun demikian, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 30 Oktober 2008 M
29 Syawal 1429 H

Penyusun

Yuki Muntasyir
NIM: 01030368

ABSTRAK

Kegiatan manusia di bumi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dari waktu ke waktu cenderung mengalami proses yang sama, yakni bagaimana ia berburu, bercocok tanam, berdagang dan lain-lain. Hal ini menandakan bahwa manusia mempunyai pola perilaku yang relatif sama meski tidak persis dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Sungguh sangat alami, dalam konteks usaha mengembangkan ekonomi yang Islami yang mencoba melihat sebuah hasil pemikiran yang sangat brilian di waktu lalu, sebagai inspirasi dan petunjuk. Dari sekian banyak tokoh yang memiliki kecemerlangan pandangan, kecemerlangan pikiran dalam segala bidang termasuk ekonomi adalah Ibnu Taimiyah.

Titik tolak penelitian ini, adalah fikiran Ibnu Taimiyah mengenai negara atau pemerintahan dalam Islam dan peran negara dalam distribusi kekayaan. Secara singkat Ibnu Taimiyah mengedepankan kebebasan individu selaku pelaku pasar. Hal ini tertuang pada kekuatan penawaran dan permintaan, namun di sisi lain kebebasan ini terbatas oleh wewenang negara yang tertuang dalam perundang-undangannya yang lebih menekankan pada kemaslahatan umat dan prinsip keadilan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan Ibnu Taimiyah tentang negara atau pemerintahan dalam hukum Islam dan peran negara dalam distribusi kekayaan serta memberikan penjelasan sejauh mana campur tangan negara atau pemerintahan dalam perekonomian secara umum dan distribusi kekayaan secara khusus.

Sedangkan faedah yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai khasanah kepustakaan bagi para peminat studi tentang ekonomi khususnya tentang sistem ekonomi Islam, tentang peran negara dalam distribusi kekayaan serta dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai peran negara dalam distribusi kekayaan sebagai arah kebijakan ekonomi Indonesia yang diwarnai nilai-nilai Islami.

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur, oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode kajian pustaka, baik yang berupa buku maupun hasil-hasil penelitian terdahulu. Metode analisisnya adalah metode induktif dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah landasan pendirian negara menurut Ibnu Taimiyah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan tujuan berdirinya negara menurut Ibnu Taimiyah adalah; (1) negara sebagai alat untuk menjalankan syariat Islam (2) negara berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan bersama secara hakiki, lahir dan batin seluruh rakyat, dan (3) negara merupakan lembaga yang harus bertanggungjawab dalam menjalankan amanah dan menciptakan keadilan. Peran negara dalam distribusi kekayaan menurut Ibnu Taimiyah mengandung dua unsur, yaitu menjalankan amanah dan menciptakan keadilan. Untuk mewujudkan hal itu, dalam masalah perekonomian, negara mempunyai tiga peranan yaitu (1) peranan alokasi, (2) peranan distribusi pendapatan/ kekayaan, (3) peranan stabilisasi perekonomian. Campur tangan negara dalam perekonomian didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

DAFTAR ISI

JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Talaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH DAN PEMIKIRAN POLITIKNYA

A. Riwayat Hidup dan Aktifitas Intelektual Ibnu Taimiyah	17
B. Kondisi Politik dan Kenegaraan	23
C. Karya Tulis Ibnu Taimiyah	29
D. Konsep Dasar Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah	31
1. Landasan Amanah dan Keadilan dalam Praktek Penyelenggaraan Negara	32
2. Pengangkatan Kepala Negara	43
3. Tugas Kepala Negara	36

**BAB III NEGARA DAN PEMERINTAH DALAM PANDANGAN IBNU
TAIMIYAH**

A. Landasan Pendirian Negara dan Pemerintah dalam Islam	38
1. Al-Qur'an	38
2. Al-Hadits	41
B. Kewajiban Mendirikan Sebuah Negara	42
C. Tujuan Didirikannya Negara dalam Islam	44
D. Lembaga-Lembaga Pemerintahan dan Fungsi-Fungsinya dalam Islam	51
1. Legislatif	51
2. Eksekutif	54
3. Yudikatif	55

**BAB IV PERAN NEGARA DALAM DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM
PANDANGAN IBNU TAIMIYAH**

A. Peran Negara dalam Perekonomian	58
1. Gagasan Campur Tangan Negara	66
2. Kendala dan Kegagalan Pemerintah	68
B. Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan	70
C. Kebijakan Negara dalam Distribusi Kekayaan	73
1. Asal Mula dari Kebijakan Fiskal	74
2. Macam Kebijakan Fiskal	77
3. Tujuan Kebijakan Fiskal	81
D. kebijakan Untuk Mengubah Distribusi Pendapatan	82

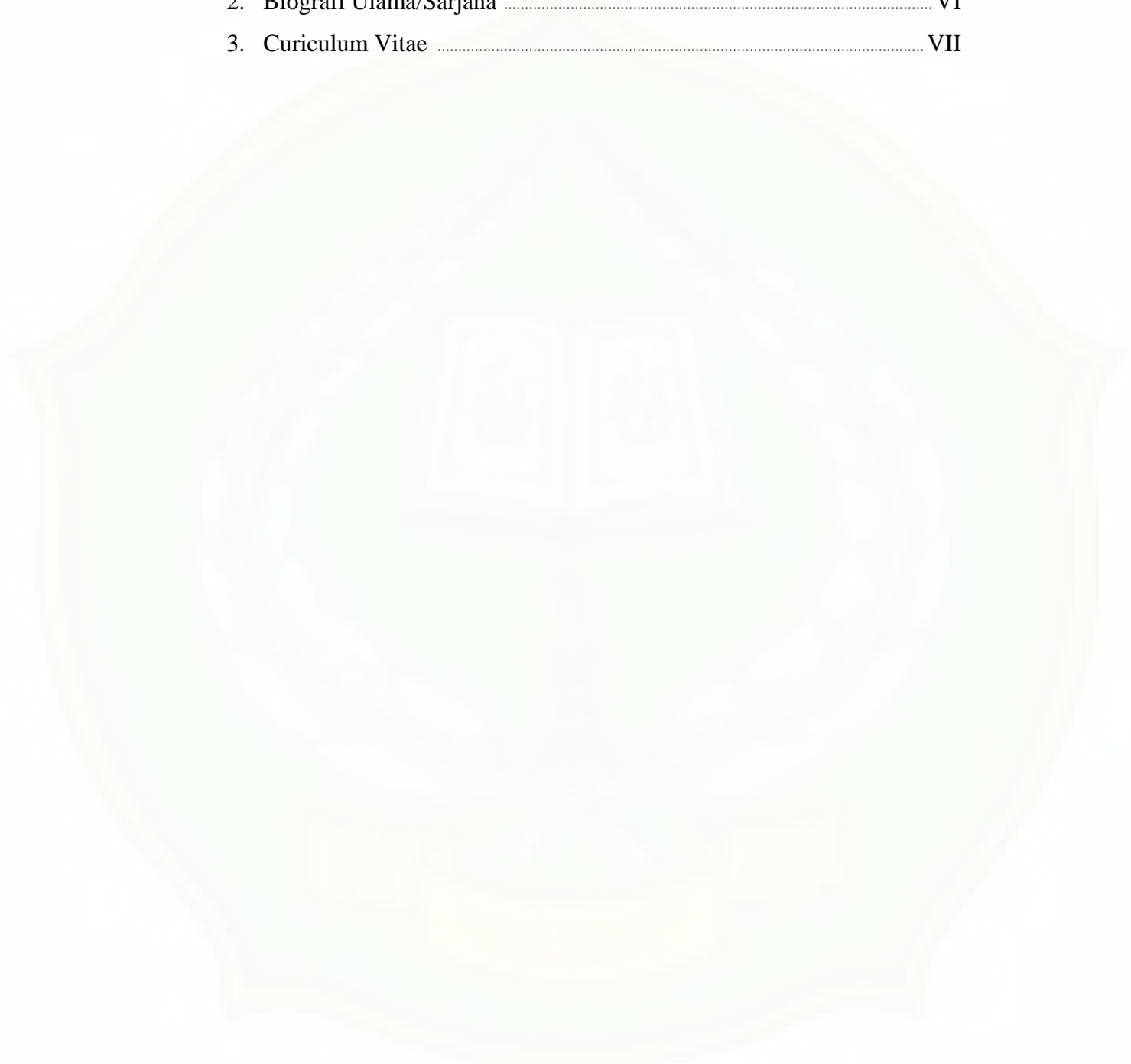
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan I
2. Biografi Ulama/Sarjana VI
3. Curriculum Vitae VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Distribusi kekayaan dalam masa sekarang ini merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dan rumit dilihat dari keadilannya dan pemecahannya yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa pendapatan sangat penting dan perlu, tapi yang lebih penting lagi adalah cara distribusi. Jika para penghasil itu rajin dan mau bekerja keras, mereka akan dapat meningkatkan kekayaan negara, akan tetapi jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian besar kekayaan ini akan masuk kedalam kantong para kapitalis, sehingga akibatnya banyak masyarakat yang menderita kemiskinan dan kelebihan kekayaan negara tidak mereka nikmati.

Bahkan dalam masyarakat modern yang makmur, di mana terdapat kekayaan yang melimpah, pembagian kekayaan itu sendiri belum merata sehingga masih banyak warga negara yang menderita kemiskinan. Semua itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang tidak tepat, yaitu ada sekelompok masyarakat yang kehilangan hak bagiannya. Hal itu bisa menyebabkan kesedihan dan juga kemarahan.¹⁾

Realitas kemiskinan di Indonesia saat ini, adalah suatu hal yang nyata. Tingginya angka pengangguran dan makin meningkatnya jumlah angka

¹⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, cet. II. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 92.

kemiskinan, merupakan problem yang sulit dipecahkan. Tentu saja hal ini antara lain disebabkan oleh distribusi kekayaan / pendapatan²⁾ yang tidak seimbang dan tidak merata diantara individu-individu dalam masyarakat itu sendiri. Kebijakan negara yang hanya menitikberatkan pada pengumpulan modal secara besar-besaran, telah menyebabkan adanya monopoli kekayaan, sehingga hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, dan melupakan kepentingan sosial masyarakat.

Memang, sampai kini kekacauan sirkulasi kekayaan merupakan masalah tersendiri dan memunculkan pelbagai macam persepsi. Dalam pandangan sistem kapitalisme, sebagaimana dinyatakan Heilbroner, cara utama dalam pendistribusian kekayaan adalah melalui persaingan pasar.³⁾ dalam pandangan yang paling berperan dalam persaingan pasar adalah harga. Harga dianggap sebagai salah satu penentu distribusi kekayaan kepada anggota masyarakat. Alasannya adalah naik turunnya harga barang, serta naik turunnya daya beli terhadap suatu barang. Bagian tiap-tiap orang untuk

²⁾ Adapun yang dimaksud dengan distribusi kekayaan/pendapatan adalah suatu cara dimana kekayaan nasional didistribusikan keberbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap Negara dan menyangkut juga prinsip yang menentukan bagian dari faktor-faktor tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai : *pertama*, penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang. *Kedua*, pembagian barang keperluan sehari-hari (saat keadaan darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. Lebih jelas baca dalam, Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Pedagang/Muhammad as a Treader*, (Jakarta:Yayasan swarna Bumi, 1995), hlm.285. baca juga *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), hlm.238. Selanjutnya Paul A. Samuelson & William D. Nordbans, dalam bukunya, *Mikro Ekonomi*, Edisi Keempat Belas (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm. 417. Menjelaskan kata "pendapatan" berarti penerimaan total atau kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan ini terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasil atas milik, (seperti sewa, bunga, dan deviden) dan tunjangan transver pemerintah. Sedangkan "kekayaan" artinya nilai rupiah bersih aktiva (asset) yang dimiliki pada waktu tertentu.

³⁾ Robert Heilbroner, *Runtuhnya Peradaban Kapitalisme*, alih bahasa: Yep Sujana, cet. I. (Jakarta: Bumi Angkasa, 1984), hlm.17.

mendapatkan kekayaan negara disesuaikan dengan nilai jasa-jasa yang telah diinvestasikan untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Artinya diukur berdasarkan tanah atau modal yang sudah dimiliki.⁴⁾

Kenyataannya, distribusi pendapatan ternyata semakin terabaikan selama bertahun-tahun belakangan ini. Banyak orang yang mulai merasa bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah gagal memberantas, atau bahkan mengurangi kemiskinan absolut yang cenderung semakin parah.

Struktur ekonomi dibangun berdasarkan peraturan pemerintah. Walaupun disibukkan untuk memenuhi kebutuhan materi dan keperluan masyarakat tapi masyarakat dibelenggu oleh tanggungjawab yang dibebankan oleh negara. Negara-negara besar dunia lah yang menggariskan peraturan ekonomi tapi kemudian penerapannya dipaksakan kepada masyarakat. Ternyata undang-undang dan administrasi mengganggu urusan masyarakat banyak karena buruknya keadaan yang disebabkan oleh ketidakadilan orde ekonomi. Perekonomian yang jelek disebabkan oleh pembentukan sistem ekonomi yang salah dan tidak mendasar. Bila mereka gagal meningkatkan gairah masyarakat maka kemarahan dan kegusaran akan menimbulkan pertentangan kelas dalam masyarakat. Salah mengerti terhadap keterbelakangan ekonomi dapat berakibat banyak terhadap pemilik kapital perorangan, tanah dan industri.

Kegiatan dan dinamika ekonomi modern, adanya pemerintah sebenarnya bisa hadir secara aktif dan dinamis di dalam sistem ekonomi tanpa

⁴⁾ Taqi al-Din al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa M. Maghfur Wachid, cet. I, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.28.

merusak kekuatan pasar yang positif. Peran pemerintah bisa datang dengan kekuatannya yang memaksa, menentukan aturan-aturan, mengarahkan proses distribusi dan produksi, bahkan memberi lisensi dan hak monopoli kepada lembaga-lembaga di dalam atau di luar pemerintah sendiri. Hal-hal yang disebutkan di atas ini merupakan kenyataan dari peran pemerintah, yang tidak diperhitungkan sebagai faktor penting seperti faktor tangan ghaib di dalam konsep ekonomi klasik tadi.⁵

Masalah-masalah kebutuhan, produksi, konsumsi, pemasaran, dan distribusi itulah yang dapat dipandang sebagai persoalan-persoalan kunci ekonomi. Sejauh mana hukum Islam memberikan pedoman dalam masalah ekonomi ini, terutama yang berkaitan dengan masalah peran negara dalam distribusi kekayaan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang negara atau pemerintahan dalam Islam ?
2. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang peran negara dalam distribusi kekayaan ?

⁵ Didik J. Rachbini, *Ekonomi politik: Kebijakan Dan Strategi Pembangunan*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 9.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan melihat pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan pandangan Ibnu Taimiyah tentang negara atau pemerintahan dalam hukum Islam.
2. Menjelaskan pandangan Ibnu Taimiyah tentang peran negara dalam distribusi kekayaan serta menjelaskan campur tangan negara atau pemerintahan dalam perekonomian secara umum dan dalam distribusi kekayaan secara khusus.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai khasanah kepustakaan bagi para peminat studi tentang ekonomi khususnya tentang sistem ekonomi Islam.
2. Sebagai bahan kajian tentang pandangan sistem ekonomi terhadap peran negara dalam distribusi kekayaan.
3. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai peran negara dalam distribusi kekayaan sebagai arah kebijakan ekonomi Indonesia yang diwarnai nilai-nilai Islami.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa buku yang membahas peran negara atau pemerintah di bidang perekonomian dalam Islam, rata-rata menerangkan, bahwa peran atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian merupakan kebolehan. Beberapa buku tersebut menganalisis kebolehan intervensi pemerintah sebagai

suatu sarana guna mewujudkan *maqasid asy-syari'ah* dalam menggapai masyarakat yang adil dan makmur.

Antara lain, buku *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* karya Ibnu Taimiyah yang terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama menguraikan tentang penyampaian amanat kepada yang berhak, khususnya tentang penunjukan dan pengangkatan para pejabat negara, pengelolaan kekayaan negara dan harta benda rakyat. Bagian kedua membahas tentang pelaksanaan hukum-hukum pidana hak Tuhan dan hak sesama manusia; kemudian ditutup dengan dua pasal masing-masing tentang musyawarah dan tentang pentingnya ada pemerintahan. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Taimiyah sendiri, bahwa bukunya itu merupakan satu uraian yang singkat, pembahasan dalam buku itu hanya terbatas pada garis-garis besar saja tanpa rincian.⁶

Ada beberapa penelitian yang berbentuk skripsi yang berada di beberapa fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga antara lain; *Konsep Ibnu Taimiyah Tentang Intervensi Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pasar*, karya Asep Basir pada tahun 1999, sebagaimana judulnya, penelitian ini berisi tentang pandangan Ibnu Taimiyah tentang campur tangan pemerintah dalam menentukan harga pasar.

Kemudian skripsi yang berjudul "*Beberapa Prinsip Kebijakan Moneter Menurut Ibnu Taimiyah*", yang disusun oleh Siti Najma tahun 1999, ia menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan moneter atau ekonomi menurut pemikiran Ibnu Taimiyah.

⁶ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 83.

Sementara skripsi yang berjudul ” *Intervensi Pemerintah Terhadap Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun)*”, yang disusun oleh Nurdin Baroroh pada tahun 2004, memberikan perhatian khusus pada masalah intervensi pemerintah dalam menentukan tingkat harga dan menjelaskan mekanisme pasar, membandingkan pemikiran antara Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penelitian tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang peran negara dalam distribusi kekayaan/pendapatan layak untuk dikaji, karena memang belum ada yang melakukan penelitian secara khusus mengenai tema tersebut.

E. Kerangka Teori

Dalam dunia modern dewasa ini, tanggungjawab pemerintah jelas semakin berat dan kompleks di tengah gerak gelombang perekonomian dan sosial kemasyarakatan yang dihadapkan pada dunia modern dan globalisasi, dimana pemerintah mempunyai tugas yang semakin berat dalam mengatur berbagai macam kepentingan dalam masyarakat yang semakin berkembang, ketika terjadi benturan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam perekonomian, sehingga hak dan kewajiban antara individu dan masyarakat dapat berjalan dan terpenuhi dengan baik.

Konflik yang terjadi di masyarakat sering dikarenakan benturan kepentingan antara individu ataupun kelompok dalam masyarakat, yang membuat keberadaan pemerintah sangat dibutuhkan. Ini pernah dilontarkan

Filosof Jerman Hegel, ia memandang bahwa negara dan pemerintah adalah satu-satunya institusi yang mampu mengatasi konflik dan perpecahan yang ditimbulkan oleh *civil society*, karena menurutnya, bahwa *civil society* itu penuh dengan konflik dan cenderung mengacaukan masyarakat itu sendiri.⁷

Selain Ibnu Taimiyah, pemikiran tentang konsep peran pemerintah dalam Islam juga dibahas oleh Umer Chapra, seorang Ekonom kontemporer Islam, bahwa peranan pemerintah menurut Islam adalah suatu peranan positif. Pemerintah mempunyai tanggungjawab moral untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua, dengan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, mempertahankan kereta ekonomi untuk tetap berjalan di atas jalur yang telah disepakati, mencegah penyelewengan yang dibuat oleh pribadi maupun kelompok yang merugikan masyarakat banyak serta mengarahkan pembangunan ekonomi sesuai dengan tujuan Syariat Islam.⁸

Sehubungan dengan ini, al-Qur'an juga telah memerintahkan kaum muslimin untuk taat kepada pemerintahan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صَلَّى فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ^ع ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.⁹

⁷ Dawam Raharjo, *Negara Dan Pasar Dalam Perspektif kapitalis*, Jurnal Media Inovasi. No. 2. Th. X., (2000), hlm. 31.

⁸ Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, alih bahasa Nur Hadi Ihsan, cet. I. (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 248.

⁹ An-Nisa (4): 59.

Sebagai amanat, maka sudah seharusnya suatu pemerintahan yang benar menurut Islam adalah menyampaikan dan menjalankan amanat tersebut sesuai dengan apa yang dituntut dalam amanat itu sendiri, seperti dinyatakan al-Qur'an:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ^ج إن الله نعماء يعظكم به ^{فلي} إن الله كان سميعا بصيرا ¹⁰

Amanat yang terkandung dalam suatu pemerintahan menurut Islam tersebut, Yusuf Musa menjelaskan bahwa bagi suatu pemerintahan Islam, setidaknya terdapat tiga asas fundamental yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraannya yaitu: (1) syura yang harus dilaksanakan terutama dalam masalah yang menyangkut kepentingan umum; (2) keadilan umum yang wajib dilaksanakan oleh seluruh aparat pemerintahan; (3) mendapat dukungan dari orang-orang yang kuat dan jujur.¹¹

Menurut Abul A'la al-Maududi, dalam menjalankan suatu pemerintahan, negara harus mendasarkan kepada syari'at Islam. Karena hukum Islam adalah tatanan yang sempurna, keseluruhan yang bulat, yang mendasarkan diri pada himpunan postulat-postulat yang jelas dan pasti.¹²

Secara lebih rinci, Maududi memberikan empat prinsip yang menjadi landasan bagi negara, antara lain: mengakui kedaulatan Tuhan; menerima

¹⁰ An-Nisa (4): 58.

¹¹ M. Yusuf Musa, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, (Mesir: Jami'ah ad-Duwal al-Arabiyyah, 1962), hlm. 117.

¹² Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Alih bahasa Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 145.

otoritas Nabi Muhammad SAW.; memiliki status “wakil Tuhan”; dan menerapkan musyawarah. Berdasarkan prinsip tersebut, maka kedaulatan yang sesungguhnya berada di tangan Tuhan. Nama yang lebih cocok untuk politik Islam adalah “kerajaan Tuhan” (*kingdom of god*).¹³

Hal senada juga dikemukakan oleh Mawardi maupun Ibnu Khaldun. Menurut al-Mawardi, kepemimpinan negara sesungguhnya merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Oleh karena itulah, ia merupakan tuntunan syari’ah dan dengan demikian sudah seharusnya ia mendasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hukum Islam.¹⁴

Kaitannya dengan gejolak perekonomian seperti ini, peran pemerintah dalam Islam pernah dibahas oleh para ulama dan pemikir Islam, diantaranya adalah Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan bahwa pengawasan atas sektor ekonomi, termasuk pasar adalah tanggungjawab pemerintah, namun walaupun demikian, Ibnu Taimiyah tidak menyukai campur tangan pemerintah dalam pasar, ketika mekanisme pasar berjalan alamiyah (normal), yakni tidak adanya manipulasi dalam pasar.¹⁵

Ibnu Taimiyah kemudian menafsirkan syariat dengan cara yang sanggup menjamin kebebasan luas bagi individu, terutama dalam lapangan ekonomi. Untuk mempertahankan kekayaan perorangan dari cengkaman

¹³ *Ibid.* hlm. 159.

¹⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, alih bahasa Masrohin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 12.

¹⁵ A. A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa; Anshari Thayib, cet. I. (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 229-230.

masyarakat, ia menegaskan, bahwa ”semua kebaikan (barang) di dunia telah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hanya Allah saja yang membagikan kekayaan di kalangan individu yang beraneka ragam”. Oleh sebab itu, negara tidak berhak mengambil alih kekayaan pribadi karena perilaku itu hanya akan merusak rancangan segala sesuatu yang berasal dari Allah. Namun, ia juga mengharapkan agar orang-orang kaya hidup berdampingan secara damai dengan kaum miskin. Dengan kata lain, prinsip kompetisi harus diganti dengan asas koperasi atau kerjasama dan saling tolong menolong.

Islam juga telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan pada segelintir orang saja. Allah SWT. Berfirman:

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم¹⁶

Lebih dari itu, ia mengatakan bahwa negara ikut wajib ikut tampur tangan apabila terjadi monopoli atau pedagang menaikkan harga barang di atas nilai tukar berbagai komoditi yang ditetapkan. Andaikata para pedagang memberlakukan harga-harga palsu di pasaran, negara wajib memberikan teguran dan hukuman yang sepadan. Namun, negara tidak berhak menurunkan harga di bawah nilai tukar komoditi yang wajar. Biarkan orang-orang menentukan diri mereka sendiri karena Allah akan menciptakan suasana saling

¹⁶ Al-Hasyr (59): 7.

menguntungkan di antara sesama mereka, demikian *laissez faire* versi Ibnu taimiyah.¹⁷

Islam menghindarkan kerumitan dan membatasi pemerintah pada ruang yang terbatas pula. Islam menghendaki manusia terhindar dari segala keburukan dan kesalahan memanfaatkan kekayaan karena kewajiban pemerintah adalah melindungi milik perorangan atau milik pribadi dan membentuk pusat-pusat kesejahteraan masyarakat. Negara harus memelihara fungsi badan-badan tersebut yang sesungguhnya bukan tugas perorangan. Untuk itu, harus dilihat pula pelaksanaan sistem ekonomi dalam memelihara keseimbangan semua faktor ekonomi, permintaan dan penawaran, modal, produk-produk dan distribusi pendapatan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Saifuddin Azmar, menyatakan bahwa penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu persoalan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi, karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta

¹⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, hlm. 101-102.

¹⁸ Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, alih bahas Achmad Rais, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 87-88.

mencarikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.¹⁹⁾

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.²⁰⁾

2. Sifat Penelitian

Sebagaimana penelitian pustaka, maka dalam menganalisis data, penyusunannya menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu data yang dikumpulkan, dirumuskan, dijelaskan dan kemudian dianalisa. Selain itu, juga akan menjelaskan dan menafsirkan data-data yang ada, menjadi suatu rumusan yang sistematis dan analitis.²¹⁾

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan sumber data primer yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu buku-buku Ibnu Taimiyah dan data-data yang berkaitan dengan masalah peran negara dalam distribusi kekayaan, serta data skunder yaitu bahan-bahan tertulis seperti surat kabar, majalah, internet dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁹⁾ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, cet.II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1

²⁰⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*,(Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²¹⁾ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. III. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

4. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan historis dan pendekatan normatif. Dengan pendekatan ini akan dilihat hal-hal apa saja yang melatar belakangi pemikiran tentang peran negara dalam distribusi kekayaan. Sedang pendekatan normatif penyusun gunakan untuk menilai aspek hukum yang terdapat dalam peran negara dalam distribusi kekayaan.

5. Analisa Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode induktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²²⁾

Dengan metode ini nantinya penyusun dapat menyimpulkan pemikiran Ibnu Taimiyah dan hukum tentang peran negara dalam distribusi kekayaan yang terkandung dalam sistem hukum Islam yang menjadi acuan dalam menganalisa secara obyektif dari permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat maka pembahasan ini disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan yang ada dan saling berhubungan satu sama yang lain.

²²⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 42.

Diawali bab satu yang memuat tentang pendahuluan, yang berisi hal-hal yang melatar belakangi penelitian yang nantinya menjadi dasar dari perumusan pokok masalah dan tujuan dari penelitian ini. Kemudian telaah pustaka yang menunjukkan posisi penelitian ini dibanding penelitian yang lain. Selanjutnya ialah kerangka teoritik dan metode penelitian, yang menjelaskan perangkat teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan metode yang tepat dalam menentukan pendekatan masalah tersebut. Terakhir, dikemukakan tentang bagaimana sistematika pembahasannya.

Pada bab dua berisi tentang biografi Ibnu Taimiyah dan pemikiran politiknya. Dimulai dengan riwayat hidup dan aktifitas intelektual Ibnu Taimiyah untuk mengetahui latar belakang kehidupannya. Setelah itu memaparkan karya-karyanya serta menjelaskan pemikiran politiknya tentang amanah dan keadilan dalam praktek penyelenggaraan negara. Kemudian menerangkan pengangkatan kepala negara dan tugas kepala negara.

Pada bab ketiga berisi pandangan Ibnu Taimiyah tentang negara dan pemerintahan. Dimulai dengan landasan pendirian negara dan pemerintahan dalam Islam yaitu dasar-dasar pokok yang menjadi acuan bagi pendirian negara dan pemerintahan tersebut. Setelah itu menjelaskan kewajiban mendirikan sebuah negara dan tujuan didirikannya sebuah negara, berkaitan dengan perlunya sebuah negara diadakan. Kemudian menerangkan tentang lembaga-lembaga pemerintahan dalam Islam serta tugas-tugasnya.

Bab keempat, yang merupakan pokok dari penelitian ini menganalisa tentang peran negara atau pemerintahan dalam distribusi kekayaan/pendapatan

menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, diawali pemikirannya tentang peran negara dalam perekonomian, menjelaskan gagasan campur tangan negara, bidang-bidang apa saja yang bisa diintervensi oleh pemerintah serta kendala dan kegagalan pemerintah. Kemudian menerangkan peran negara atau pemerintah dalam distribusi kekayaan, bagaimana keterlibatannya dalam menentukan distribusi agar keadilan dan kemakmuran bisa terwujud, serta kebijakan-kebijakan negara dalam distribusi kekayaan yang berisi tentang prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan ekonomi yang digunakan untuk mengatur distribusi kekayaan. Diakhiri dengan pemaparan tentang relevansi peran negara atau pemerintahan dalam perekonomian di Indonesia.

Pada bab terakhir berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada. Saran-saran memuat masukan-masukan yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah), maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu ;

1. Landasan pendirian negara menurut Ibnu Taimiyah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah yang tercermin dalam surat an-Nisa' 4 : 59, tentang taat pada *waliyul amri*, surat an-Nisa' 4 : 58, tentang menyampikan amanah kepada yang berhak, surat Ali Imron 3 : 110, tentang jihad, surat an-Nur 24 : 55, masalah amal sholeh, surat al-An'am tentang manusia menjadi pemimpin di muka bumi. Sedangkan dalam as-Sunnah, salah satunya adalah hadis dari Ibnu Umar tentang diperlukannya seorang pemimpin walaupun jumlahnya Cuma tiga orang.

Sedangkan tujuan didirikannya sebuah negara menurut Ibnu Taimiyah adalah; (1) negara sebagai alat untuk menjalankan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan umat manusia sebaik-baiknya, (2) negara berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan bersama secara hakiki, lahir dan batin seluruh rakyat, dan (3) negara merupakan lembaga yang harus bertanggungjawab dalam menjalankan amanah dan menciptakan keadilan.

Dalam Islam ada tiga lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi masing-masing yaitu; (1) legislatif sebagai pembuat undang-undang yang berdasar pada al-Qur'an dan as-Sunnah, (2) eksekutif sebagai *ulil amri* dan

umara harus mentaati Allah dan Rasulullah saw dan (3) yudikatif sebagai *qadha* atau hakim.

2. Peran negara dalam distribusi kekayaan menurut Ibnu Taimiyah harus mengandung dua unsur yaitu menjalankan amanah dan menciptakan keadilan. Untuk mewujudkan hal itu, dalam masalah perekonomian, peran negara mempunyai tiga peranan yaitu; (1) peranan alokasi, yaitu peranan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien, (2) peranan distribusi pendapatan/kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar dan (3) peranan stabilisasi perekonomian. Campur tangan negara dalam perekonomian didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah seperti surat Ali Imron 3 : 104. Terdapat fakta sejarah pada zaman Nabi saw dalam kegiatan pengawasan pasar yang disebut "*hisbah*", hal ini juga diteruskan pada masa khalifah Umar bin Khattab dengan tujuan mencegah kecurangan dalam berbagai bentuk. Khusus peran negara dalam distribusi kekayaan negara berkembang harus aktif dan positif untuk meningkatkan tingkat kemakmuran rakyatnya.

B. Saran-saran

1. Kepada para pemimpin negara khususnya dan pemimpin lainnya dalam menjalankan amanatnya harus memegang prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.
2. Peran negara dalam distribusi kekayaan harus dominan karena untuk menjaga dua prinsip diatas, maka harus diserahkan pada orang yang mempunyai sifat *siddiq*, *amanah*, *tablig* dan *fatamah*.
3. Bagi para peneliti, hendaknya dapat mengadakan penelitian lanjutan mengenai gagasan besar Ibnu Taimiyah ini.
4. Kepada mahasiswa, hendaknya perlu ada keseimbangan antara teori dan praktek dalam pelaksanaan ekonomi yang terus berkembang dengan berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

Taimiyah, Ibnu, *al-Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyat, t.t.

Hadis/Ulumul Hadis

Hadis riwayat Bukhari-Muslim, Copi CD Kutub al-Tis'ah.

Lain-Lain

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, cet. II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

-----, *Muhammad Sebagai Pedagang/Muhammad as a Trader*, Jakarta: Yayasan swarna Bumi, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.

Sanusi, Bachrawi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Bernard Lewis, "*Ibn Taimiyyah*" dalam *The Encyclopaedia of Islam*, jilid III, Leiden: E. J. Brill, 1979.

Chapra, Umer, *Islam Dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, alih bahasa Nur Hadi Ihsan, cet. I. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Sagiv, David, *Islam Otentitas Liberalisme*, alih bahasa Yudian W. Amin, Yogyakarta: 1997.

Raharjo, Dawam, *Negara Dan Pasar Dalam Perspektif kapitalis*, Jurnal Media Inovasi. No. 2. Th. X., 2000.

Rachbini, Didik J., *Ekonomi politik: Kebijakan Dan Strategi Pembangunan*, Jakarta: Granit, 2004.

Mangkoesebroto, Guritno, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2001.

Islahi, A. A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, cet. I., Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Rojak, Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan : Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, alih bahasa Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Due, John F., *Government Finance*, Richard D. Irwin Inc., Homewood, Illionis, 1959.

Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.

Komaruddin, *Pengantar Kebijakan Moneter*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

K. Hitti, Phillip, *History of Arabs*, London: Macmillan Press, 1970.

Maududi, Abul A'la Al-, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam Abul A'la Al-Maududi*, alih bahasa Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. III. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Mubarak, Muhammad Al-, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, alih bahasa Firman Harianto, Solo: Cv. Puataka Mantiq, 1995.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam bidang Fiqh Islam*, Jakarta: Inis, 1991.

Sjadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.

Musa, M. Yusuf, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, Mesir: Jami'ah ad-Duwal al-Arabiyah, 1962.

Suparmoko M., *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000.

Nababan, M. Faruq an-, *al-Iqtishad fi al-Islam*, alih bahasa Muhadi Zainudin dan Bahaudin Noersalim, Cet. I., Yogyakarta: UII Press, 2000.

Nabhani, Taqi al-Din al-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa M. Maghfur Wachid, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Nasysyar, Ali Sami an-, dan Ahmad Zaki, “ kata pengantar editor” dalam *Ibn Taimiyah Siyasah Syar’iyah Etika Politik Islam*, alih bahasa Rofi Munawwar Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Samuelson, Paul A. & William D. Nordbans, balam bukunya, *Mikro Ekonomi*, Edisi Keempat Belas, Jakarta: Erlangga, 1993.

Heilbroner, Robert, *Runtuhnya Peradaban Kapitalisme*, alih bahasa: Yep Sujana, cet. I. Jakarta: Bumi Angkasa, 1984.

Azmar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet.II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Saud, Mahmud Abu, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, alih bahas Achmad Rais, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Taimiyah, Ibnu, *al-Hisbah fi al-Islam*, Damaskus: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 1976.

-----, *Siyasah Syar’iyyah, Etika Politik Islam*, alih bahasa Rofi’ Munawar, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Zahir, Ihsan Ilahi, “ Pengantar “, dalam *Ibnu Taimiyah Tawassul dan Wasilah*, alih bahasa Su’adi Sa’ud, Jakarta: Pustaka Panjimas. 1987.

Kamus Bahasa

Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	8	9	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
2	9	10	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah membeli pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
3	11	16	Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu.
			BAB II
4	34	33	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah membeli pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
5	34	34	Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta ta'atilah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
6	34	35	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

			BAB III
7	39	4	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
8	39	5	Jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) an rasul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
9	39	6	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah membeli pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
10	40	7	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.
11	40	8	Dan Allah telah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang di ridhai-Nya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi rasa aman.
12	40	9	Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk) Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
13	40	10	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat : "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang

			<p>khalifah di bumi”, Mereka berkata : “mengapa Engkau ekan menjadikan (khalifah) di bumi, orang yang akan membuat kerusakan di bumi dan akan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji-Mu dan mensucikan-Mu ?”, Tuhan berfirman : “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.</p>
14	40	11	<p>Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang pedih, karena mereka melupakan hari perhitungan.</p>
15	41	12	<p>Tidaklah halal bagi tiga orang yang sedang berada di sebuah padang sahara (tanah lapang) kecuali salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin. (HR. Imam Ahmad di dalam musnadnya.)</p>
16	41	13	<p>Jika tiga orang keluar untuk bepergian maka hendaklah salah seorang di antara mereka diangkat sebagai pemimpin. (HR. Abu Dawud dari Abi Sa’id Al-Khudzry dan Abu Hurairah).</p>
17	41	14	<p>Al-Imam (pemerintah) adalah pemimp-pin rakyat, dan ia bertanggungjawab atas yang dipimp-pinnya. (Bukhari dan Muslim).</p>
18	45	19	<p>Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat.</p>
19	46	20	<p>Dan katakanlah: “Ya Tuhan-ku, Masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.</p>
20	48	22	<p>Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan</p>

			keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
21	48	23	(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar ; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.
22	48	24	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.
23	49	26	(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar ; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.
24	54	33	Dan janganlah kamu mentaati orang yang hatinya telah kami alpaikan dari mengingat Kami, orang yang hanya menuruti hawa nafsunya saja! Orang yang demikian itu telah melampaui batas.
25	54	34	Janganlah mentaati orang-orang yang melampaui batas (yang telah Kami tetapkan), orang-orang yang menciptakan kerusakan di muka bumi dan tidak memiliki kecenderungan untuk memperbaiki diri mereka sendiri.
26	55	35	Sekalipun seorang budak hina diangkat sebagai <i>Amir</i> kalian, dengar dan taatilah sepanjang dia memimpinmu sesuai dengan Kitab Allah.
27	55	36	Ketaatan diwajibkan kepada setiap muslim, apakah dia menyukai perintah itu atau tidak, kecuali jika dia diperintahkan untuk berbuat dosa, di mana kewajiban ini batal secara otomatis.

28	55	37	Tidak ada kataatan dalam perbuatan dosa. Ketaatan hanya diwajibkan untuk kebajikan.
29	56	40	Oleh karena itu, adililah menurut apa yang telah diturunkan Allah dan janganlah kamu turuti hawa nafsu mereka yang akan membelokkan mereka dari kebenaran yang datang kepadamu.
30	56	41	Apakah yang mereka kehendaki adalah hukum jahiliah? Adakah yang lebih baik selain hukum Allah bagi kaum yang berkeyakinan (atas apa yang mereka imani?).
			BAB IV
31	67	7	Hendaklah ada di antara kamu umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

BIOGRAFI ULAMA

IBNU TAIMIYAH

Ibnu Taimiyah nama populer dari Ahmad Taqiy ad-Din Abu al-‘Abbas ibn asy-Syaikh Syihab ad-Din Abiy al-Mahasin ‘Abd as-Salam ibn Abi Muhammad ‘Abd Allah ibn Abi al-Qasim al-Khadlar ibn Muhammad ibn al-Khadlar ibn ‘Ali ibn ‘Abdullah al-Mulaqqab ibn Taimiyah.

Ibnu Taimiyah dilahirkan di kota Harran Mesopotamia Utara (termasuk wilayah Turki) pada 10 Rabiul Awal tahun 661 H (22 Juni 1263 M), sebagai seorang putera seorang alim besar dalam mazhab hambali bernama Abu Muhammad ‘Abd al-Halim ibn ‘Abd as-Salam al-Harrani. Beliau meninggal pada tanggal 20 zu al-Qa’dah 728 H./ 26 September 1328 M.

Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga besar Taimiyah, yakni suatu marga yang terpelajar dan terpendang karena kedalaman ilmu agamanya. Ia adalah putra dari ‘Abd. al-Halim ibn ‘Abd. al-Salam (627-682 H.), seorang khatib sekaligus imam besar di Damaskus selain seorang guru yang mengajarkan ilmu Tafsir dan juga Hadis. ‘Abd. al-Halim juga seorang direktur pada madrasah Dar al-Hadis as-Sukhariyah, yakni semacam lembaga pendidikan Islam yang beraliran mazhab Hambali. Di lembaga tersebut itu pula lah Ibnu Taimiyah belajar dan dididik oleh bapaknya sendiri. Kakeknya Syekh Majd al-Din Abi al-Barakat ‘Abd. al-Salam Ibn ‘Abd. Allah adalah seorang ulama yang terkenal, seorang ahli tafsir, ahli hadis, ahli usul fiqh, ahli fiqh, ahli nahwu dan seorang pengarang.

Ilmu pertama yang Ibnu Taimiyah dipelajari adalah al-Qur’an dan hadis, kemudian ilmu bahasa. Dalam bidang ilmu hadis Ibnu Taimiyah mempelajari *musnad*, *syarah* dan berbagai *sunan*, antara lain musnad Imam Ahmad ibn Hambal, Sahih Bukhari dan Muslim, kitab Jami’ Imam Tirmizi, sunan Abi Daud, sunan al-Nasa’i, sunan Ibn Majah dan Daru Quthni.

Karya-karya besar Ibnu Taimiyah antara lain:

1. *Al-Sarim al-Maslul ‘ala al-Satim al-Rasul*.
2. *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqd Kalam al-Syi’ah wa’l-Qadariyah*.
3. *Kitab an-Nubuwwah*

Sebuah pembahasan yang sangat kritis dan filosofis mengenai kenabian, sihir, keajaiban-keajaiban, dan hal-hal yang serba rahasia. Diterbitkan k.I. pada tahun 1346.

4. *Tafsir al-Kawakib*

Di antara karangan-karangan lain Ibnu Taimiyah yang sudah terbit ialah:

(1) *as-Siyasah asy-Syar’iyah*, (2) *al-Fatawa* (5jilid), (3) *al-Iman*, (4) *al-jami’ bain an-Naql wa al-‘Aql*, (5) *Minhaj as-Sunnah*, (6) *al-Furqan bain Auliya’ Allah wa Auliya’ asy-Syaitan*, (7) *al-Wasithah bain al-Haq wa al-Khalq*, (8) *al-Sarim al-Maslul ‘ala Syatim ar-Rasul*, (9) *Majmu’ ar-Rasail*, (29 naskah), (10) *Nazariyyah al-‘Aqd(Qa’idah fi al-“uqud)*, (11) *Talkhis Kitab al-Istighasah (ar-Radd ‘ala al-Nakri)*, (12) *ar-Radd ‘ala al-Akhkamy*, (13) *Ra’ul al-Malam an al-Aimmah alA’lam*, (14) *Syarh al-‘Aqidah al-Fiqhiyyah*, (15) *Majmu’ al-Rasail wa al-Masail* (5 juz), (16) *at-Tawasul wa al-Wasilah*, (17) *Naqd al-Mantiq*, (18) *al-Fatawa*, dan masih banyak lagi lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yuki Muntasyir
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 05 Februari 1981
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Konsentrasi Pendidikan : Syari'ah/mu'amalah
Alamat Asal : Ds. Karangpetir No. 21 RT 03/II Kec. Tambak
Kab. Banyumas JAWA TENGAH

Nama Orang Tua
Nama Bapak : Warsono
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Fatonah
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Riwayat Pendidikan

1. TK ABA Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas.
Angkatan Tahun 1987.
2. MI Islamiyah Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas.
Angkatan Tahun 1987-1993.
3. MTs Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Kec. Kemranjen Kab. Banyumas.
Angkatan Tahun 1993-1996.
4. MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Kec. Kemranjen Kab. Banyumas.
Ankatan Tahun 1996-1999.
5. UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta.
Angkatan Tahun 2001- Sekarang.